

Dewan Sidoarjo Berang

Berulang Kali Minta Data Kekosongan Jabatan Tak Kunjung Diberi

Sidoarjo, Memo X

Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo dibuat berang (emosi) saat hearing (rapat dengar pendapat) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo, Senin (21/11/2022). Ini menyusul permintaan para politisi soal data kekosongan ratusan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo itu tidak kunjung dipenuhi oleh BKD Pemkab Sidoarjo.

"Setidaknya, sudah tiga kali pertemuan (Komisi A) dan BKD. Tapi permintaan ke BKD untuk menginformasikan data kekosongan jabatan mulai dari tingkat kelurahan hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo tak kunjung diberikan. Padahal, tujuan kami untuk kajian dan pengawasan. Pengisian jabatan kosong itu demi optimalisasi pelayanan publik untuk masyarakat," ujar anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto yang juga politisi PDI Perjuangan ini kepada Memo X, Senin (21/12/2022).

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Haris. Menurut politisi PAN ini kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo sudah terlalu lama. Karena itu pihaknya khawatir akan berdampak pada layanan yang diberikan ke masyarakat Sidoarjo.

"Kalau hanya diisi Plt (pelak-



HEARING - Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo menggelar hearing bersama para pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo soal kekosongan ratusan jabatan di DPRD Sidoarjo, Senin (21/11/2022).

sana tugas) nanti alasannya selalu ragu-ragu dalam mengambil kebijakan. Itu karena alasannya masih status Plt," ungkapnya.

Selain itu, anggota Fraksi PAN DPRD Sidoarjo ini penentuan posisi pegawai khususnya di tingkat kepala OPD memang wewenang Bupati Sidoarjo. Apalagi, Pemkab Sidoarjo juga telah menggelar seleksi terbuka dan mencapai tahap akhir.

"Kalau tidak suka (hasilnya) kan masih bisa diganti. Yang penting jangan terlalu lama pengisian kekosongan jabatan itu. Terutama kekosongan jabatan kepala OPD," paparnya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori menam-

bahkan data internal yang dimilikinya setidaknya ada sekitar 201 kekosongan jabatan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Baginya, hal itu bisa menimbulkan masalah besar jika tidak segera dicarikan solusinya. Karena itu, Komisi A DPRD Sidoarjo terus mendorong untuk segera ada pengisian kekosongan jabatan itu.

"Kami minta data yang lebih rinci juga diperlukan untuk mengawal efektifitas penempatan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Tapi, kalau tidak kunjung dipenuhi, kami ada hak interpelasi yang bisa kami gunakan setiap saat dan setiap waktu. Kalau permintaan kami

tidak dihiraukan," kata politisi yang juga anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo ini.

Sementara Sekretaris BKD Pemkab Sidoarjo, Zainul Arifin Umar mengaku permintaan data dari DPRD Sidoarjo itu pihaknya hanya bisa mengupayakan sesuai kemampuan. Alasannya, pihaknya tidak berani menyampaikan dalam forum hearing itu.

"Kami belum bisa menjawab tegas dalam forum ini. Untuk pengisian kekosongan jabatan sendiri juga butuh banyak pertimbangan. Termasuk penyesuaian dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) terbaru," kilah Zainul.

Selain itu, Zainul menambahkan saat ini Pemkab Sidoarjo juga tengah fokus untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Total ada alokasi 2.856 formasi pegawai yang dibutuhkan. Dengan rincian 1.251 tenaga guru, 1.398 tenaga kesehatan dan 207 tenaga teknis.

"Berdasarkan pendataan yang dilakukan BKD, ada sekitar 8.000 pegawai non ASN dan P3K di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Padahal, ketentuan baru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bakal menghapus tenaga honorer pada November 2023 mendatang," tandasnya. (par/wan)

Seleksi PPPK, BKD Ada Jalur Prioritas untuk Guru dan Nakes

KOTA-Masa pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih berlangsung. Pemkab juga menyediakan sejumlah jalur prioritas untuk menampung para pegawai yang cukup lama mengabdikan tapi belum berstatus PPPK.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zainul Arifin Umar mengungkapkan, jalur prioritas itu ada di seleksi PPPK jabatan fungsional guru. Yakni terbagi dalam prioritas 1 (P1), prioritas 2 (P2) dan prioritas 3 (P3). P1 adalah tenaga honorer kategori 2, guru non ASN, ataupun lulusan PPG dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK tahun 2021.

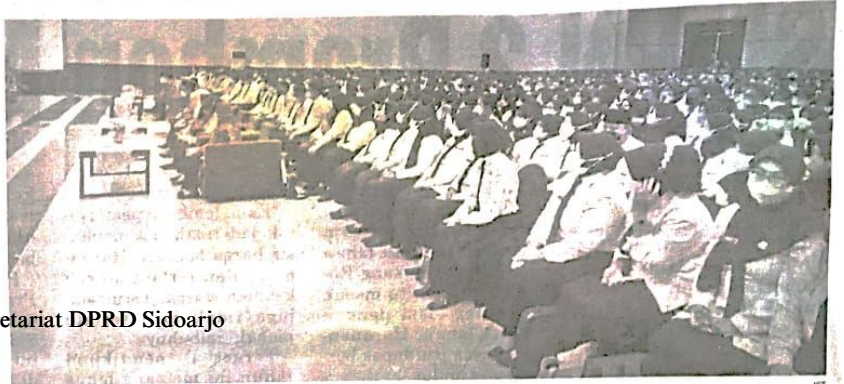
Untuk P2 adalah tenaga honorer kategori 2. Dan P3

adalah guru non ASN di sekolah negeri yang telah terdaftar di dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah tiga tahun.

"P1 itu bisa langsung pemberkasan. Sementara P2, P3 tidak perlu tes CAD, tapi ada mekanisme observasi salah satunya melibatkan kepala sekolah," jelasnya.

Zainul melanjutkan, pada seleksi tenaga kesehatan juga ada jalur prioritas. Yakni jalur seleksi tenaga kesehatan honorer yang telah terdata pada SISDMK. "Catatan kami sudah ada 1.005 nakes," sebutnya.

Berbagai jalur prioritas itu juga dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menampung sejumlah pegawai yang telah mengabdikan tapi masih belum berstatus PPPK ataupun ASN. Karena pendataan



MENGABDI: Penyerahan SK P3K yang telah lolos beberapa waktu lalu.

yang dilakukan BKD, ada sekitar delapan ribu pegawai non ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Pada ketentuan baru dari Badan Kepegawaian Ne-

gara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bakal menghapus tenaga honorer pada November 2023 nanti.

Zainul juga menguraikan, jalur prioritas juga masih baru ada di seleksi tenaga kesehatan dan guru. Sementara untuk tenaga teknis masih belum ada. (son/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ribuan Tenaga Honorer Pemkab Sidoarjo Terancam Di-Outsourcing-kan

Sidoarjo, Pojok Kiri
Ribuan pegawai honorer yang saat ini bekerja di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo terancam kehilangan mata pencahariannya atau maksimal diakhiri statusnya sebagai pekerja outsourcing, pada akhir tahun depan.
Pasalnya, menurut Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Zainul, pada 28 November 2023 mendatang, personel-personel yang dipekerjakan di lingkungan Pemkab harus berstatus ASN atau Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Sampai saat ini belum ada rencana yang jelas dari pemerintah pusat untuk pegawai-pegawai non ASN. Dan kami pun juga belum punya skema terkait hal itu," ujar Zainul dalam forum Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi A DPRD Sidoarjo, Senin (21/11).

Dijelaskannya, hingga hari ini tercatat ada 8.183 orang non ASN yang dipekerjakan di semua OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Tahun ini, lowongan yang dibuka untuk tenaga PPPK "hanya" untuk 2.856 orang. Rinciannya, 1.251 formasi tenaga guru, 1.398 orang tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 207 formasi.
"Berarti jika tahun depan dianggap ada rekrutmen PPPK lagi dengan jumlah yang sama, maka dari jumlah itu akan ada sekitar 2.500 tenaga honorer yang tidak kebagian tempat. Dan kalau sampai tahun depan BKD tidak punya konsep bagi mereka berarti kemungkinan terburuknya akan jadi pegawai outsourcing," lanjut Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori yang diwakili Zainul.
Fenomena milah yang kemudian disesalkan Komisi A. Mereka pun mempertanyakan

kinerja, komitmen dan kepedulian BKD Sidoarjo terkait nasib para pekerja honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri di Pemkab Sidoarjo.
Apalagi, dalam forum tersebut BKD juga tidak bisa menjanjikan akan lebih memprioritaskan pegawai honorer yang lebih senior untuk bisa bersaing dengan para yunior yang sudah meraih status PPPK yang diperubuhkan secara terbuka melalui mekanisme tes. Misalnya memberikan pelatihan khusus maupun tryout bagi pegawai senior tersebut sebelum menghadapi tes. "Ya, kami memang belum mampu berikan (pelatihan/tryout) itu," imbuh Kepala Bidang Pengembangan BKD Sidoarjo, Farida.
Dikatakannya, prioritas terhadap pegawai honorer senior tersebut hanya bisa dilakukan pada personel-personel yang bergerak di tenaga pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk tenaga teknis, murni berdasarkan



hasil tes.
"Untuk guru, akan diprioritaskan pada tenaga pendidik yang sudah lulus passing grade. Berikutnya ada skema tambahan untuk P2 atau prioritas kedua dan P3 atau prioritas ketiga. Sedangkan untuk tenaga medis diprioritaskan untuk 1.005 pegawai afirmasi," jelas Farida.
Pimpinan anggota Komisi A yang mengantar penjelasan tersebut langsung kecewa. "Kalau aturan ini nantinya benar-benar diterapkan dan BKD tidak mengantisipasinya mulai saat ini, bisa-bisa bakal banyak SD Negeri yang kekurangan guru. Terus bagaimana nasib pendidikan kita?," sergah Dhamroni dengan nada tinggi.
Yang lebih mengecewakan lagi, dalam rapat tersebut, pihak OPD yang diundang hanya menghadirkan pejabat-pejabat "kelas 2". "Percuma kalau gini. Yang kita undang pimpinannya tapi tidak ada satupun yang datang sehingga tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan," pungkasnya. (Nang)

POJOK KIRI

Warga Sidoarjo Bisa Laporkan Apa Saja ke Call Center :

Sidoarjo, Memorandum
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

Melalui layanan respon cepat bebas pulsa 112, masyarakat Sidoarjo bisa melaporkan apa saja menyangkut pelayanan yang diberikan oleh Pemkab.

"Prioritas kami satu, memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Layanan call center 112 bebas pulsa bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan apa saja yang terkait dengan fasilitas dan layanan publik Pemkab Sidoarjo," tegas Gus Muhdlor, kemarin.

Lanjutnya, pengaduan seperti jalan berlubang, jalan rusak, pelayanan publik di desa/kelurahan, kecamatan, pelayanan dispendukcapil, pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD, layanan pendidikan dan pelayanan Air PDAM bisa dilaporkan.

Laporan masyarakat yang masuk lewat call center 112 langsung direspon oleh petugas dan instansi terkait. Sejak diluncurkan bulan Juni lalu, jumlah pengaduan rata-rata per minggu capai 100 - 150 laporan. Laporan yang masuk beragam, mulai dari lampu JPU padam, penanganan medis darurat, kebakaran, pohon tumbang, derek mobil, kecelakaan di jalan, Kamtibmas, jalan rusak, layanan catatan sipil hingga ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).

Termasuk juga laporan adanya hewan berbahaya seperti ular yang memasuki rumah. Petugas dengan cepat merespon laporan-laporan yang masuk untuk memberikan pertolongan dan penanganan darurat.

Plt Kepala Dinas Komunika-



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali terus berupaya memberikan yang terbaik buat warga.

si dan Informatika Pemkab Sidoarjo, Didik Tri Wahyudi menjelaskan, petugas call center 112 siap siaga 24 jam menerima laporan dan menginput ke sistem. Laporan yang masuk dari masyarakat. Laporan tersebut, lanjut Didik, langsung diteruskan ke instansi terkait agar segera mendapatkan penanganan.

"Call center 112 terhubung dengan semua OPD,

mereka kerja sampai 3 s.d 24 jam melayani masyarakat juga punya instagram @arjo yang bisa dilihat masyarakat untuk melihat penangan laporan jumlah pengaduan sudah tertangani," pungk (jok/milk)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penantaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN) Surabaya melalui Jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Sempurna, Regional Surabaya terhadap barang jaminan debitur atas nama:

- Muhammad**
 - 1. (Batuk) bidang tanah berikut bangunan yang berletak di atasnya sesuai SHM No. 995/Bidang tercatat atas nama Muhammad Lusa Tanah 1.284 m², yang terletak di Jl. Raya Brongkor RT 05 RW 03, Dukit, Brongkor, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Propinsi Jawa Timur. Harga Limit: Rp. 7.056.000.000, / Uang Jaminan: Rp. 3.000.000.000.
 - 2. (Batuk) bidang tanah berikut bangunan yang berletak di atasnya sesuai SHM No. 624/Gembung tercatat atas nama Karmah Lusa Tanah 97 m², yang terletak di Jl. Raya Ngembung, Dukit, Ngembung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Harga Limit: Rp. 809.000.000, / Uang Jaminan: Rp. 400.000.000.
- PT. Putra Bangsa Sentosa**
 - 1. (Batuk) bidang tanah berikut bangunan yang berletak di atasnya sesuai SHM No. 0593/Modokan Ayu (diidentifikasi: Jl. Tambak Modokan Ayu XI D Kav. 79A), Lusa Tanah 102 m² terletak atas nama Farid Ehamdi, yang terletak berada di Jalan Tambak Modokan Ayu XI D No. 36 Reti Di. Modokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Harga Limit: Rp. 851.500.000, / Uang Jaminan: Rp. 255.000.000.
 - 2. (Batuk) bidang tanah berikut bangunan yang berletak di atasnya sesuai SHM No. 2838/Modokan Sempari (diidentifikasi: Jl. Sempari Indah), Lusa Tanah 85 m² tercatat atas nama Farid Ehamdi, yang terletak berada di Jl. Modokan Sempari Indah No. 2 Reti Di. Modokan Sempari, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Harga Limit: Rp. 924.908.000, / Uang Jaminan: Rp. 277.000.000.

Deskripsi Penjualan Lelang:

- Memiliki akun yang telah terverifikasi dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id
- Memiliki objek lelang pada bank yang akan diakuhi pada website di atas.
- Mengikuti akun yang telah terverifikasi dan terverifikasi account yang terverifikasi melalui website di atas sebelum memilih dan mengikuti objek lelang tersebut melalui lelang jaminan yang dipromosikan.
- Uang jaminan harus sudah efektif di rekening bank KPKN sebelum pelaksanaan lelang.
- Sesuai biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lelang ini, maka penanggung jawabnya menjadi beban peserta lelang.
- Bagi peserta lelang yang ingin mengikuti lelang dengan mengunggah kontribusi objek lelang yang ada (kontribusi "as is"), Peserta lelang yang bersedia untuk jasanya akan diutamakan ke kas negara sebagai pertimbangan negara bukan pajak setelah penunjakannya sebagai pembeli ditalkalkan oleh pejabat lelang.
- Biaya baik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli.
- Karena satu dan lain hal pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/pemundahan lelang terhadap objek lelang diatas, dan pihak pihak yang berpartisipasi/jamini lelang tidak dapat memajukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat lelang, PT. Balai Lelang Sempurna Regional Surabaya, dan/atau KPKN, Surabaya.
- Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi Android melalui play store pada smartphone dengan nama lelang Indonesia atau pada internet website sebagai berikut: <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.lelang>
- Syarat dan ketentuan serta cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang:

- Cara Penawaran: Closed Bidding
- Pelaksanaan Lelang: Rabu, 07 Desember 2022
- Batas Akhir Penawaran: Pukul 09.30 Waktu Server (sesuai WIB)
- Muhammad: Pukul 10.25 Waktu Server (sesuai WIB)
- PT. Putra Bangsa Sentosa: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN) Surabaya
- Tempat Pelaksanaan Lelang: GKN 1 Lantai 5, Jl. Indrapura No. 5, Surabaya
- Penetapan Pemenang: Setelah batas akhir penawaran
- Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Bea Lelang Pembeli: 2% dari harga lelang
- Informasi Lebih Lanjut: PT. Balai Lelang Sempurna, Regional Surabaya
Telp. (031) 30 000 369 / 081 35 35 769
Surabaya, 23 November 2022
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah 06 Surabaya

TID Persepsi

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UUHT No 4 Th 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penantaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN) Surabaya melalui Jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Sempurna, Regional Surabaya terhadap barang jaminan debitur atas nama:

- RUDY CHRISTIANO yang ber (dikenal sebagai: J. Sireti Inoah VI Blok. JH No. 9, RT. 01/11, Kelurahan Jember, Kecamatan Jember, Kota Jember, Jawa Timur). Nilai Limit: Rp. 4.798.500.000, / Jaminan: Rp. 1.951.310.000

Pelaksanaan Lelang:

- Cara Penawaran: Open Bidding dengan mengikuti alamat domain www.lelang.go.id
- Hari/Tanggal: Rabu, 7 Desember 2022
- Waktu Penawaran: dimulai pukul 10.15 s.d 11.15 Waktu Server (sesuai WIB)
- Penetapan Pemenang: setelah batas akhir penawaran
- Pelunasan harga lelang: Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Bea Lelang Pembeli: 2% dari harga lelang
- Tempat Pelaksanaan Lelang: KPKN Surabaya Jalan Indrapura No. 5 Surabaya

Pengumuman Lelang:

Memiliki akun yang telah terverifikasi melalui akun mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara Penawaran". Peserta lelang dapat melihat objek lelang di: PT. Balai Lelang Star 031-82517117, 08764670991

PT. Balai Lelang Star

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan L akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tangg dan Lelang (KPKN) Lelang, melalui jasa pra debitor atas nama Hengky Siswanto Hadi, 623 m², berikut bangunan, SHM No. 1061, Kec. Kalivates, Kab. Jember, Alamat: Pa RT. 01 RW. VI, Kab. Jember, Harga Lim

KETERANGAN

- Namun jaminan yang diutamakan ke rekening/V
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh
- Sesuai biaya yang timbul sebagai akibat

SYARAT-SYARAT LELANG

- Memiliki akun yang telah ter
- Syarat dan ketentuan serta tata cara
- Objek lelang dijual dalam kondisi apa as lelang sehingga apabila ada suatu ha terhadap objek lelang tersebut di atas, p
- Peserta lelang dapat melihat barang lanjut dapat menghubungi KPKN J 428758-59, PT. Bank Central Asia, 5618921, PT. Balai Lelang Tunjungan J

PELAKSANAAN LELANG:

Cara Penawaran	Closed Bid
Hari/Tanggal	Rabu / 07
Batas Akhir Penawaran	Pukul 11.00
Penetapan Pemenang	Setelah bat
Pelunasan Harga Lelang	5 (lima) ha
Bea Lelang Pembeli	2 % dari h
Tempat lelang	Kantor Pa
	Jalan Sian
	Sura
PT. Balai Lelang Tunjungan	PT. Ba
	INFO: 081.7500.40

MEMORANDUM

BERKALA DAN MEMBEKATANAHARI

Call Center 112 Bebas Pulsa

Prioritas Layanan, Gus Muhdlor Persilahkan Warga Melapor

SIDOARJO - Pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo terus dievaluasi secara berkala oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Lewat layanan respon cepat bebas pulsa 112 warga Sidoarjo dipersilahkan melapor, apa saja yang menyangkut pelayanan yang diberikan Pemkab Sidoarjo.

Seperti melihat jalan berlubang, jalan rusak, pelayanan publik di desa/kelurahan, kecamatan, pelayanan Dispendukcapil, pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD, layanan pendidikan sekolah yang jadi kewenangan Pemkab Sidoarjo yakni tingkat SD dan SMP Negeri dan juga pelayanan Air PDAM dan juga keluhan lainnya.

Seperti halnya yang dikeluhkan pengendara kepada duta.co Selasa (22/11/22, Iswanto warga Sukodono mengatakan lampu stopan (traffic light) Wonorejo, tepatnya perempatan pingang, padam mast (tidak nyala). Hal ini bisa menyebabkan kendaraan bertabrakan bila saling tidak ada yang mengalah saat melintas. Dan ini sangat membahayakan pengendara, "Pungkas Iswanto.

Dalam hal ini, laporan ma-



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.

syarakat yang masuk lewat call center 112 langsung direspon oleh petugas dan instansi terkait. Sejak diluncurkan bulan Juni lalu, jumlah pengaduan rata-rata per minggu capai 100 - 150 laporan. Laporan yang masuk beragam, mulai dari lampu PJU padam, penanganan medis darurat, kebakaran, pohon tumbang, derek mobil, kecelakaan di jalan, Kamtibmas, jalan rusak, layanan catatan sipil hingga ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Termasuk juga lapo-

ran adanya hewan berbahaya seperti ular yang memasuki rumah. Petugas dengan cepat merespon laporan-laporan yang masuk untuk memberikan pertolongan dan penanganan darurat.

"Prioritas kami satu, memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Layanan call center 112 bebas pulsa bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan apa saja yang terkait dengan fasilitas dan layanan publik Pemkab Sidoarjo,"

tegas Gus Muhdlor kemarin.

Dari sekian laporan yang masuk, ada jenis laporan yang penyelesaiannya membutuhkan waktu. Seperti laporan jalan rusak yang penanganannya membutuhkan waktu dikarenakan penyiapan material. Meski demikian, Bupati Gus Muhdlor menyampaikan, pihaknya akan mengevaluasi kecepatan respon instansi terkait agar semua pengaduan yang masuk lewat call center 112 dapat tertangani dengan cepat, tidak terkecuali laporan warga terkait jalan rusak. Begitu juga dengan layanan catatan sipil dan pelayanan Air PDAM yang sering mendapat pengaduan masyarakat juga tidak luput dari evaluasi Bupati Gus Muhdlor.

"Jalan rusak ini yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, terutama pada musim hujan banyak pengaduan yang masuk. Solusinya, selain kita maksimalkan betonisasi sampai ke jalan desa, perbaikan jalan aspal yang rusak berlubang juga kita upayakan cepat penanganannya. Kemudian yang banyak menerima laporan pengaduan adalah layanan catatan sipil dan PDAM, ini juga akan kita

evaluasi, kita akan cari akar masalahnya," ujar bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo itu.

"Kalau laporan lainnya, seperti pohon tumbang, kecelakaan di jalan, Kamtibmas, ODGJ, ular memasuki rumah dan jenis laporan umum sudah dapat tertangani dengan cepat, yang kita evaluasi sekarang tinggal kecepatan penanganan jalan aspal yang berlubang," jelas Gus Muhdlor, bupati alumni Fisip Unai Surabaya itu.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Sidoarjo, Didik Tri Wahyudi menjelaskan, petugas call center 112 siap siaga 24 jam menerima laporan maupun pengaduan yang masuk dari masyarakat. Laporan tersebut, lanjut Didik, langsung diteruskan ke instansi terkait agar segera mendapatkan penanganan.

"Call center 112 terhubung dengan semua OPD, mereka kerja sampai 3 shift on call 24 jam melayani masyarakat. Kami juga punya instagram @112sidoarjo yang bisa dilihat masyarakat untuk melihat penanganan dan laporan jumlah pengaduan yang sudah tertangani," pungkas Didik. ● Joe

DUTA

Appraisal Tuntas, Pemkab Ajak Pemilik Berunding

TENTANG SMPN 2 PRAMBON

- Disiapkan anggaran Rp 7,6 M untuk pembebasan lahan tahun ini.
- Untuk pembangunan tahun depan dianggarkan Rp 9 M.
- Tahap awal dibangun lima kelas plus ruang guru, kantor kepala sekolah, dan perpustakaan.
- Pembangunan tahap kedua dilaksanakan 2024.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo

GRAPIS: RIZKY-JAWA POS

Lahan Bakal SMPN 2 Prambon

SIDOARJO - Penghitungan nilai atau appraisal untuk lahan yang akan digunakan sebagai SMPN 2 Prambon sudah selesai. Kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo tengah melakukan negosiasi harga dengan para pemilik.

Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirta Adi menyatakan, appraisal oleh lembaga independen menjadi dasar negosiasi

dengan pemilik. "Hasil appraisal-nya sudah disampaikan ke pemilik lahan. Sekarang masih negosiasi," jelasnya kemarin.

Tirta menyebutkan, jika nilai lahan yang ditawarkan sesuai dengan hasil appraisal itu disepakati, prosesnya berlanjut ke pembayaran. Namun, jika tidak sepakat, negosiasi akan berlanjut. Anggaran Rp 7,6 miliar sudah disiapkan untuk pembebasan lahan yang saat ini masih berupa lahan tebu tersebut.

Tirta menyebut tidak bisa memberikan harga di atas nilai appraisal. Sebab,

menurut dia, harga hasil appraisal sudah sesuai dengan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP). "Harganya sesuai dengan penghitungan. Karena kalau terlalu murah, kasihan warga. Tapi kalau terlalu mahal juga tidak bisa karena sudah ada landasannya," jelasnya.

Tirta optimistis tahun ini pembebasan lahan tuntas dan selesai sesuai dengan jadwal. Sebab, sebelumnya komunikasi dengan para pemilik juga dilakukan. Selain itu, tidak ada permasalahan tumpang-tindih kepemilikan. "Klir semuanya, ada sertifikatnya," jelasnya.

Setelah pembebasan tur depan SMPN 2 Prambon dibangun. "Sudah disiapkan pembangunan untuk tahun 9 miliar," ujarnya.

Rencananya, dibangun dulu. Selain itu, dibangun pendamping seperti ruang pustakawan, dan ruangkep. Pada 2024 pembangunan lanjutkan. "Rencana pembebasan selama dua tahun. Tahun 2024 untuk pembangunan katanya. (uzi/c19/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPUMBSDA Bakal Perbaiki...

itu akan bisa dilalui dengan normal. “Maksimal minggu ini kami akan perbaiki,” ujarnya.

Diharapkan untuk sementara waktu pengendara yang melintas juga tetap waspada. Sehingga tidak sampai menimbulkan hal yang tidak diinginkan akibat kondisi jembatan yang rusak. (son/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIPASANG SOFA: Wakil Bupati Sidoarjo Subandi (berdiri dua dari kiri) saat meninjau kondisi jembatan Desa Prasung yang rusak.

DPUMBSDA Bakal Perbaiki Jembatan Desa Prasung Pekan Ini

BUDURAN-Jembatan di Desa Prasung, Kecamatan Buduran rusak sebagian. Jembatan itu bakal diperbaiki dengan anggaran pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA).

Selasa (22/11) pagi, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi juga menyempatkan diri untuk meninjau

langsung kondisi jembatan. Jembatan sepanjang 10 meter tersebut memang cukup strategis. Karena menjadi salah satu akses penghubung Desa Prasung.

Warga sengaja menutupi titik kerusakan jembatan dengan sofa dan balok kayu. Sehingga hanya setengah jembatan bisa dilalui kendaraan secara ber-

gantian. Langkah itu dilakukan agar tidak membahayakan pengendara yang melintas.

Subandi mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemkab melalui DPUBMSDA juga bakal memperbaiki jembatan tersebut. Namun perbaikan yang dilakukan belum bisa secara total.

“Sementara perawatan dulu

minggu ini. Kalau kurang maksimal akan dianggarkan pada 2023,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono menambahkan, dua hari ke depan pihaknya akan mulai memperbaiki jembatan itu. Sehingga dalam waktu dekat jembatan

● Ke Halaman 10





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Antusiasme Tinggi...

Siswa kelas XI UTKP 3 Renata menjelaskan, batik yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut adalah batik shibori. Dijual dengan harga Rp 95 ribu. "Kami memasarkan lewat online dan offline juga," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan, potensi siswa dalam mengembangkan bakat harus didukung. Pemkab hadir di tengah-tengah siswa lulusan SMK untuk mengenalkan mereka kepada perusahaan. Dengan begitu, siswa bisa memilih jenis pekerjaan sendiri sesuai dengan minatnya.

Namun dia mengingatkan agar siswa tetap menjunjung tinggi karakter yang baik dalam dunia kerja. "Karena perusahaan tidak hanya mencari skill tetapi juga sikap yang baik," ujarnya. (nis/vga)

Antusiasme Tinggi dalam Job Matching di SMK Islam Krembung

KREMBUNG-SMK Islam Krembung melaksanakan Job Matching pada Selasa (22/11). Tujuannya untuk memfasilitasi alumni yang merupakan pencari kerja. Bahkan warga di lingkungan Kecamatan Krembung juga bisa memanfaatkan kegiatan tersebut.

Kepala SMK Islam Krembung Rudi Hariyanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut siswa juga bisa mengetahui informasi tentang dunia kerja. Yang terpenting, mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang mencari pekerja. "Sehingga tidak ada miss-matching antara pencari kerja dan perusahaan," katanya.

Dengan begitu, pencari kerja bisa menentukan posisi yang diinginkan. Total ada 11 perusahaan yang hadir dalam Job Matching tersebut. Yakni PT Bambang Djaya, PT Midcom Company, PT Jagat Laksana, CV Samudra Biru Perkasa, PT Interpan



SINERGI: Kepala SMK Islam Krembung Rudi Hariyanto (dua dari kiri) didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ainun Amalia (tiga dari kiri) saat kegiatan Job Matching.

Surabaya, CV Refira Technology Solution, QUTahu, Es Grondjoeng, PT Fedmond Groups, Toko 88, dan PT Aice Ice Cream.

Dalam kegiatan itu, SMK Islam Krembung juga menampilkan kreasi para siswa dalam

bidang kewirausahaan. Yakni berupa batik ikat dan celup yang dikerjakan dalam gelar karya P5. Mereka menciptakan produk kreatif yang menonjolkan keunggulan lokal.

● Ke Halaman 10

Job Matching di SMK Trisakti Tulangan Buka Banyak Peluang Kerja

TULANGAN-Sebanyak 32 perusahaan hadir dalam kegiatan Job Matching di SMK Trisakti Tulangan, Selasa (22/11). Kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh alumni dan siswa kelas XII SMK Trisakti Tulangan.

Kepala SMK Trisakti Tulangan Sulis Setiawati mengatakan, program tersebut banyak ditunggu oleh alumni yang saat ini masih belum bekerja atau yang baru di PHK dari tempat kerjanya. "Banyak yang berminat untuk ikut Job Matching," katanya.

Selain alumni, siswa kelas XII juga tertarik untuk melihat-lihat. Mereka berharap sebelum lulus sekolah sudah terserap sebagai tenaga kerja. Dalam kesempatan itu, siswa kelas XII juga memanfaatkan kegiatan Job Matching untuk meningkatkan kompetensi mereka. Sebab mereka bisa melihat klasifikasi apa yang dibutuhkan



KOMPAK: Kepala SMK Trisakti Tulangan Sulis Setiawati, S.Pd (lima dari kanan) mendampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia (tengah) saat kegiatan Job Matching.

oleh perusahaan.

Sulis mengapresiasi program Job Matching yang digagas oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo tersebut. Sebab bisa menjembatani siswa yang sudah lulus dan ingin bekerja. Selain itu juga bisa memberikan pengetahuan dunia kerja kepada siswa yang akan lulus.

Selama ini pihaknya sudah mempunyai MoU dengan 68 perusahaan. Diakuinya, dengan adanya kerja sama itu, penyerapan tenaga kerja bisa lebih maksimal. "Siswa yang pernah PKL di perusahaan itu, dipanggil lagi untuk melamar bekerja," ujarnya,

● Ke Halaman 10

RADAR
SIDOARJO.ID

Job Matching...

Paling tidak dalam satu perusahaan merekrut satu siswa. Maksimal sekitar 4 siswa. Kerja sama dengan perusahaan itu juga membantu sekolah menyelaraskan apa yang diinginkan perusahaan dengan apa yang diberikan

sekolah sebagai bekal siswa.

Sementara itu, Kepala Disnaker Sidoarjo Ainun Amalia berharap agar siswa SMK bisa memanfaatkan Job Matching untuk menambah jaringan dengan dunia usaha dan dunia industri. Juga meningkatkan kompetensi diri. Sebab persaingan untuk

masuk dan bertahan di dunia kerja cukup ketat.

Hal itu karena Sidoarjo menjadi daerah yang banyak diminati oleh pencari kerja. "Untuk itu siswa harus dipersiapkan agar mampu berjuang dalam persaingan dunia kerja," pungkasnya. (nis/vga)

RADAR
SIDOARJO.ID



Pembangunan SMPN Kecamatan Tulangan di Desa Grinting Disambut Gembira Oleh Warga

Sidoarjo, Pojok Kiri

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) pada Tahun 2022 ini telah melakukan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Desa Grinting Kecamatan Tulangan.

Pembangunan sekolah baru ini sebagai upaya pemerintah kabupaten untuk memenuhi pemerataan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, apalagi saat ini di kecamatan Tulangan hanya memiliki satu SMPN Negeri saja yang selama ini jadi tumpuan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya pasca lulus dari Sekolah Dasar dan ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Dilaksanakannya pembangunan SMPN di desa Grinting ini disambut gembira oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan sekolah, yakni masyarakat Desa Grinting, Desa Kemantren, Desa Modong Dan sekitarnya.

Kepala Desa Grinting Akhmad Shodirin bersama warga mengaku sangat gembira dengan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Desa Grinting, Selain memudahkan anak-anak mereka yang ingin masuk seko-

lah Negeri, keberadaan SMPN ini jelas bisa mengakomodir anak-anak yang mau masuk di SMPN, khususnya sekolah lanjutan tingkat pertama" Katanya selasa (22/11).

" Sebelum di bangunya sekolah SMPN Di Desa Grinting, anak-anak di sekitar Desa Grinting kalau ingin sekolah di SMPN negeri terlalu jauh karena di Kecamatan Tulangan SMPN cuma ada satu, kalau di Terima Syukur kalau tidak di Terima mereka (para orang tua) memilih memasukkan anak-anaknya ke SMP swasta seperti SMP Islam terpadu Ar Rahman, SMP Nurul Huda, SMP Muhammadiyah 5 serta SMP Swasta lainnya di kecamatan Tulangan" Tambahnya.

" Kita bersama masyarakat berharap Semoga SMPN yang dibangun ini dapat segera selesai dan segera di lakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tahun 2023, dan anak-anak kami agar bisa bersekolah di situ sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kami bersama warga tak lupa mengapresiasi kepada Bupati Sidoarjo beserta jajarannya serta anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang sudah berjuang dan merealisasikan pembangunan SMPN di wilayah kami," pungkasnya. (Nang)

CS



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



**WUJUDKAN KOMITMEN TINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILU 2024**

KPU Jatim Bekali Kader Desa Peduli Pemilu dan Bimtek Lanjutan

Sidoarjo, Pojok Kiri

Dalam rangka mewujudkan komitmen meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di wilayah Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) kembali membekali 25 kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Lanjutan.

Bimtek digelar pada Selasa, 22 November 2022, mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai. Bertempat di Balai Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Mengawali acara, Komisioner KPU Jatim yang juga selaku Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan bimtek ini sebagai bentuk rangkaian kegiatan setelah tahun kemarin sudah membentuk kader DP3 di Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo.

"Harapan kita dengan melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bahwa agenda DP3 berkelanjutan, agenda nasional, pilot project atau percontohan bagi desa/kelurahan lainnya terkait agen-agen pemilu dan pemilihan. Dan KPU akan terus melakukan pendampingan terhadap kader DP3 ini," katanya.

Selanjutnya, kegiatan ini sengaja disetting dalam bentuk bimtek atau Training of Trainer karena menurut Gogot, agar kader DP3 benar-benar siap ketika terjun ke masyarakat.

"Karena tujuan akhir kita adalah terbentuk agen-agen sosialisasi KPU. Kawankawan sebagai kader DP3 mampu menyampaikan informasi kepiluan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, tetangga, dan komunitasnya untuk menggunakan hak pilihnya," jelas Komisioner KPU Jatim yang sudah menjabat dua periode ini.

Sehingga tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di

Desa Bakung Pringgodani diiringi dengan kualitas pemilihnya pula. "Masyarakat di Desa Bakung Pringgodani memilih bukan karena pertimbangan pragmatis dan pertimbangan yang tidak rasional, tapi memilih dengan melihat rekam jejak, kapasitas serta program-program yang dimiliki oleh calon pemimpin yang akan dipilih," tutupnya.

Hal senada disampaikan oleh Camat Balongbendo, Ahmad Farhan. Ia berharap dengan keberadaan kader DP3 di Kecamatan Balongbendo, yang wilayahnya berada di paling ujungbarat Sidoarjo, dimana berbatasan langsung dengan Mojokerto dan Gresik, dapat menambah lagi jumlah pemilih aktif dan rasional dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. "Kami berharap adanya kader DP3 ini dapat memperlancar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024. Di sisi lain juga harapannya dapat mengurangi money politic/serangan fajar," tegasnya.

Peserta kegiatan merupakan 25 orang yang tahun sebelumnya telah diresmikan sebagai kader DP3 lokus Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Lebih lanjut, kegiatan ini menghadirkan narasumber diantaranya, Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo, Ana Azizah yang menyampaikan mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Strategi Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilu Tahun 2024. Lalu, pemateri kedua, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Jamil yang menjelaskan terkait Politik Uang dan Kampanye Sara sebagai Extra Ordinary Crime dalam Pemilu/Pemilihan.

Pemateri ketiga yakni Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Parmas) KPU Jatim, Prahastiwi Kurnia Sitorosmi. Ia menyampaikan materi Public Speaking. Sedangkan materi keempat mengenai Teknik Dinamika Kelompok, yang dipandu oleh moderator Akbar Maulana dan Zakirin Manzhila Nurilma. (Gat/*)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Subandi Sidak Jembatan Rusak di Desa Prasung

SIDOARJO - Jembatan di Desa Prasung Kecamatan Buduran yang kondisinya sudah rusak akan segera dilakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran pemeliharaan dari Dinas PUBMSDA Sidoarjo. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi saat Sidak langsung kondisi jembatan dengan Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono dan Kades Prasung, Selasa (22/11/22).

Jembatan sepanjang 10 meter yang menghubungkan antar dusun di Desa Prasung tersebut sementara waktu oleh warga ditutupi sebagian ruasnya dengan kayu balok dan bambu agar bisa dilewati kendaraan roda dua dan roda empat secara bergantian.

Wabup Sidoarjo H. Subandi mengatakan untuk sementara ini perbaikan jembatan tersebut dilakukan melalui anggaran pemeliharaan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Apabila nantinya perbaikan dirasa kurang maksimal, maka akan dilakukan pembangunan jembatan

yang lebih baik. Seperti pelebaran jembatan. Namun hal itu dapat dilakukan ditahun 2023 mendatang.

“Sementara kita lakukan perawatan dulu dalam waktu Minggu ini dikerjakan, kalau nanti perawatan masih tidak efektif, Insya Allah tahun anggaran 2023 kita bangun jembatan yang bagus,” ucapnya.

Subandi mengakui akses jalan melalui jembatan tersebut memang padat. “Jembatan ini menjadi akses kendaraan dari arah Desa Banjarsari maupun menuju dari Desa Dukuh Tengah, menjadi hilir mudik masyarakat setiap harinya,”terangnya.

Senada Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan perbaikan jembatan akan segera ditindaklanjutinya. Dalam dua hari ini, perbaikan jembatan itu akan mulai dilakukan. Sehingga Akhir Desember sudah bisa selesai.

“Dua hari kedepan jembatan ini sudah ada pelaksanaan perbaikan, minimal Minggu ini sudah ada mulai dilakukan perbaikan,”ucap Dwi. ● loe

DUTA



PEMOTONGAN UNGGAS: Pedagang unggas di Pasar Unggas Sepanjang, Kecamatan Taman untuk sementara waktu dilarang beroperasi. Hal ini merupakan buntut dari demo warga beberapa waktu lalu. BM/ST

Pasca Didemo Warga, Pemotongan di Pasar Unggas Sepanjang Ditutup

SIDOARJO (BM) - Pedagang unggas di Pasar Unggas Sepanjang, Kecamatan Taman untuk sementara waktu dilarang beroperasi. Hal ini merupakan buntut dari demo warga beberapa waktu lalu yang menuntut rumah pemotongan unggas di sana ditutup.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, Bahrul Amig, bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, mengunjungi pasar tersebut untuk bertemu para pedagang di sana.

Widiyantoro mengatakan, terkait polemik antara warga dengan pedagang itu, pihaknya untuk sementara ini telah mengambil langkah normatif dengan menghentikan sementara aktivitas di sana. Hal itu dilakukan untuk meredam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Kalau masalah limbah. Ini sedang kami koordinasikan dengan DLHK. Karena pengolahan limbah ini ada standarnya, ya. Tapi, yang jelas, untuk sementara, normatifnya kami hentikan dulu pemotongan unggasnya," kata Wiwid, Senin (21/11).

Wiwid menambahkan, nantinya akan kembali mengadakan pertemuan untuk membahas polemik ini. Tujuannya, tentu agar dapat mencapai solusi terbaik untuk masing-masing pihak baik itu dari warga ataupun pedagang di sana.

Di sisi lain, salah seorang pedagang unggas di pasar tersebut, Imam menyampaikan, ada lima komitmen yang telah disepakati antar sesama pedagang. Komitmen itu dibuat sebagai bentuk jaminan kepada masyarakat kalau sungai dan lingkungan masyarakat sekitar tidak akan tercemar lagi.

"Lima poin itu adalah menutup saluran agar tidak langsung membuang ke sungai, limbah unggas akan kami tampung untuk kami kelola, kami sanggup menjalankan pengolahan limbah melalui IPAL, kami akan konsisten menjalankan pengolahan limbah secara terus-menerus, dan kami akan melakukan pendekatan kepada warga untuk bisa menerima dan memaklumi ikhtiar kami," kata Imam.

Imam menambahkan, para pedagang juga berinisiatif untuk membuat sumur resapan. Lokasinya berada di belakang rumah pemotongan unggas. Tujuannya tentu agar limbah potongan unggas ini tertampung dan tidak mencemari saluran air di sana. "Kami juga tadi lakukan bersih-bersih di titik sungai yang katanya tercemari limbah akibat pemotongan unggas," ujarnya. (udi)

Pol PP Porong Amankan Manusia Silver Juga Anjal, Gelandangan dan Pengemis



OPERASI: Satpolpp dan petugas gabungan saat operasi berhasil amankan manusia silver serta beberapa anjal, pengemis, gelandangan di kawasan lampu merah arteri Porong. (gus)

Sidoarjo, Memo X

Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kecamatan Porong, menertibkan para anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dikawasan lampu merah (Traffic Light), arteri Lingkungan Kenongo, Kelurahan Juwet-Kenongo, Kecamatan Porong, Selasa (22/11/2022) siang.

Mengetahui kedatangan petugas gabungan Satpolpp, Polsek, Koramil, mereka para anak jalanan (anjal), gelandangan, dan pengemis yang biasanya mangkal di tempat tersebut tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah.

Handoko (34) manusia silver asal Desa Candipari mengakui dirinya selama menjadi kuli bangunan dikarenakan sepi job, terpaksa beralih menjadi manusia silver, dan mangkal di lampu merah. Profesi ini yang dilakoninya sejak seminggu yang lalu. "Saya terpaksa melakukannya, karena untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari," ujarnya.

Sementara Camat Porong Choirul Anam melalui Kasi Trantib Wahib Achmadi menjelaskan razia penertiban ter-

hadap para anjal, gelandangan, dan pengemis adalah salah satu bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 pasal 13 tentang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat.

"Mereka para anjal, gelandangan, dan pengemis yang terjaring razia di beberapa titik tempat. Diantaranya dikawasan lampu merah (Traffic Light) diamankan, dan dibawa ke kantor kecamatan untuk dilakukan pembinaan. Alhamdulillah, setelah dilakukan pembinaan, mereka sadar dan tidak akan kembali untuk mengulangi," ungkap Wahib.

Lebih lanjut Wahib mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas, jika mereka masih terlihat tetap bandel, dan turun di jalan. Sebab keberadaan mereka ini selain membuat resah, juga cukup membahayakan bagi pengguna jalan khususnya roda dua maupun roda empat. Sebab di jalan raya arteri muaranya berbagai macam kendaraan, pungkasnya. (gus/dar)

Redaktur: Suyono Warsa | Layouter: Oki

Betonisasi Jalan Desa Masif Warga Bentangkan Spanduk Ucapkan Terima Kasih ke Bupati Sidoarjo

Sidoarjo, Memo X

Satu per satu jalan desa dibeton Pemkab Sidoarjo. Sejumlah proyek betonisasi jalan Tahun 2022 sebagian sudah selesai dan sebagian lagi sedang dalam proses pengerjaan.

Proyek betonisasi yang sudah rampung itu diantaranya Jalan Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono dan Desa Pagerngumbuk dan Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu.

Selesaiannya proyek betonisasi jalan yang dilaksanakan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali itu disambut riang gembira warga Sidoarjo. Hal itu, tampak dari spanduk yang dibentangkan warga Desa Masangan Kulon di pintu masuk gapura desa. Spanduk diperkirakan berukuran 1,5 x 2,5 meter itu tertulis ucapan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo Atas Bantuan Pengerjaan Jalan Masangan Kulon.

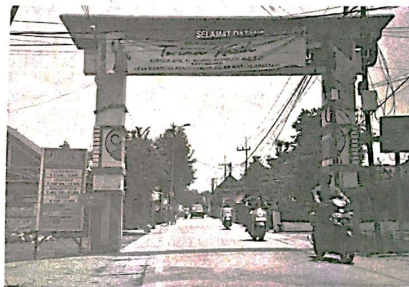
Ucapan terima kasih warga Masangan Kulon tidak berlebihan. Alasannya, karena jalan desa itu kerap kali rusak. Jalan berlubang dengan genangan air di sepanjang jalan Masangan Kulon menjadi hal biasa sebelum jalan itu dibeton.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali yang akrab dipanggil Gus Muhdlor sendiri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sidoarjo atas dukungan proyek betonisasi jalan yang dilakukannya. Pihaknya menyadari saat proyek betonisasi dikerjakan, aktivitas warga akan terganggu. Namun pahit itu hanya sementara.

"Manisnya bisa dirasakan seluruh masyarakat Sidoarjo selama berpuh-puluh tahun lamanya. Seperti minum jamu, pahitnya hanya sesaat. Tapi, kita dapat kembali buger setelah meminumnya," ujar Gus Muhdlor kepada Memo X, Selasa (22/11/2022).

Karena itu, Gus Muhdlor meminta masyarakat bersabar jika proyek betonisasi sedang dikerjakan. Kesabaran itu salah satu bentuk dukungan terhadap program pembangunan. Gus Muhdlor juga mengajak masyarakat untuk optimis terhadap pembangunan yang sedang dikerjakan Pemkab Sidoarjo. Sikap seperti ini akan meningkatkan semangatnya untuk membawa perubahan di Sidoarjo.

"Saya mohon maaf kalau



SELESAI - Proyek betonisasi yang selesai seperti di Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono dan Pagerngumbuk, Kecamatan Wonoayu diapresiasi warga dengan memasang spanduk ucapan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo atas betonisasi jalan rusak, Selasa (22/11/2022).

proyek ini mengganggu aktivitas masyarakat. Tapi, saya yakinkan proyek ini pada akhirnya akan membuat kita semua bahagia. Karena 10 sampai 20 tahun nanti kita tidak akan jumpai jalan rusak di Kabupaten Sidoarjo," tegas Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Sementara itu Gus Muhdlor menegaskan proyek betonisasi

akan terus digenjoy. Tahun depan akan diteruskan. Oleh karenanya, sebagian besar anggaran APBD Sidoarjo bakal dialokasikannya untuk infrastruktur jalan beton.

"Tahun 2023 nanti, proyek betonisasi akan kita lakukan kembali. Targetnya seluruh jalan di wilayah Kabupaten Sidoarjo dibeton," tandas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini. (par/wan)

Appraisal Tuntas, Pembebasan Lahan SMPN 2 Prambon Masuk Tahap Negosiasi

PRAMBON-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo ngebut untuk menyiapkan lahan pembangunan SMPN 2 Prambon. Kini proses kajian nilai appraisal telah tuntas dilakukan.

Kepala Dispendikbud Sidoarjo Tirto Adi mengungkapkan, pihaknya memang telah bekerjasama dengan lembaga independen untuk menentukan harga tanah yang akan dijadikan salah satu SMP Negeri itu.

"Kajian tuntas dan sudah disampaikan ke pemilik lahan," terangnya.

Menurut Tirto, saat ini tahap pembebasan lahan yang ada di belakang Komral Prambon itu masuk tahap negosiasi dengan pemilik lahan. Harapannya proses itu dapat berlangsung mulus.

Dia menambahkan, untuk harga beli yang disampaikan ke pemilik lahan juga tidak bisa sembarangan. Artinya tetap berpedoman hasil

kajian appraisal yang telah dilakukan.

"Kami lembaga pemerintah, jadi tidak bisa menaksir harga sendiri. Harganya kalau terlalu murah kasihan warga. Termasuk juga tidak bisa terlalu mahal," imbuhnya.

Target Dispendikbud tahun ini memang fokus pada pembebasan lahan. Sementara untuk proses pembangunan fisik bakal dimulai pada 2023 nanti.

Pihaknya merencanakan pada tahap pertama

akan membangun lima kelas terlebih dahulu. Kemudian pembangunan akan dilakukan secara bertahap.

Pembangunan SMPN 2 Prambon itu juga salah satu langkah Pemkab Sidoarjo untuk meratakan infrastruktur pendidikan di Sidoarjo. "Harapannya warga Prambon dan sekitarnya tidak kesulitan untuk mengakses SMP Negeri," ucap mantan Kepala Dinas Sosial Sidoarjo itu. (son/vga)



TARGET PEMBANGUNAN: Lahan yang akan dibangun SMPN 2 Prambon.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidak Jembatan Rusak di Prasung Wabup Sidoarjo Instruksikan Dinas PUBM dan SDA Segera Perbaiki

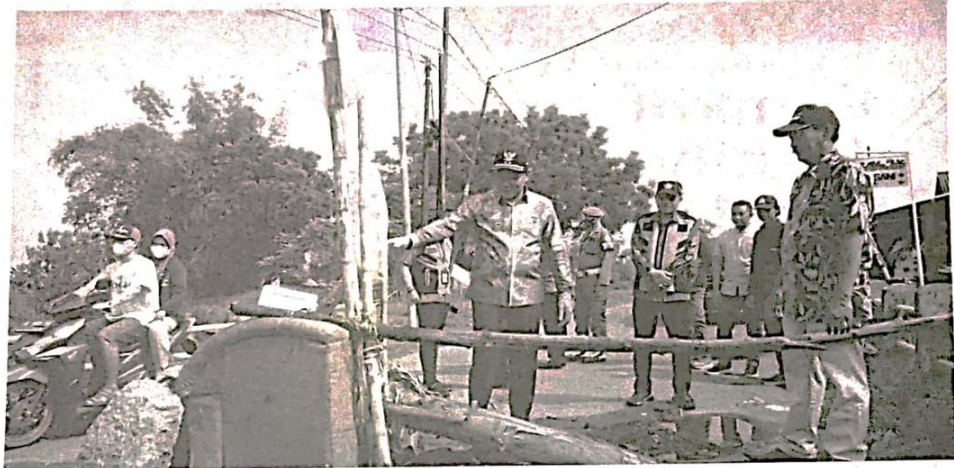
Sidoarjo, Memo X

Sebuah jembatan di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo yang kondisinya sudah rusak berat bakal segera diperbaiki. Perbaikan itu menggunakan anggaran pemeliharaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo.

Kepastian itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi saat Sidak langsung kondisi jembatan dengan Kepala Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo, Dwi Eko Saptono dan Kades Prasung, Selasa (22/11/2022).

Jembatan sepanjang 10 meter yang menghubungkan antar dusun di Desa Prasung itu untuk sementara waktu oleh warga ditutup sebagian ruasnya dengan kayu balok dan bambu. Hal itu, agar bisa dilewati kendaraan roda dua dan roda empat secara bergantian.

Wabup Sidoarjo, Subandi mengatakan untuk sementara ini perbaikan jembatan itu dikerjakan menggunakan anggaran pemeliharaan Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo. Jika nantinya perbaikan dirasa kurang maksimal, maka akan dibangun jembatan yang lebih baik lagi.



SIDAK - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi saat Sidak langsung kondisi jembatan rusak di Desa Prasung, Kecamatan Buduran dengan Kepala Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo, Dwi Eko Saptono dan Kades Prasung, Selasa (22/11/2022).

Seperti pelebaran jembatan. "Tapi itu dapat dilakukan di Tahun 2023 mendatang. Sementara kita lakukan perawatan dulu. Minggu ini dikerjakan. Kalau nanti perawatan masih tidak efektif, Insyaallah tahun anggaran 2023 kita bangun jembatan yang bagus," kata Subandi.

Selain itu, Subandi mengakui akses jalan melalui jembatan itu memang padat. Alasannya,

jembatan itu menjadi akses kendaraan dari arah Desa Banjarsari maupun menuju dari Desa Dukuhtengah, Kecamatan Buduran. "Jembatan ini menjadi hilir mudik masyarakat setiap harinya antar desa dan antar kecamatan," tegas Subandi.

Sementara Kepala Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo, Dwi Eko Saptono mengakui perbaikan jembatan akan segera ditindak-

lanjutnya. Dalam dua hari ini, perbaikan jembatan itu akan mulai dikerjakan.

"Harapannya, akhir Desember sudah bisa selesai. Dua hari ke depan jembatan ini sudah ada pelaksanaan perbaikan. Minimal Minggu ini sudah ada mulai diperbaiki," tandasnya. (par/wan)

MEMO X

Appraisal Tuntas, Pemkab Ajak Pemilik Berunding

TENTANG SMPN 2 PRAMBON

- Disiapkan anggaran Rp 7,6 M untuk pembebasan lahan tahun ini.
- Untuk pembangunan tahun depan dianggarkan Rp 9 M.
- Tahap awal dibangun lima kelas plus ruang guru, kantor kepala sekolah, dan perpustakaan.
- Pembangunan tahap kedua dilaksanakan 2024.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo



Lahan Bakal SMPN 2 Prambon

SIDOARJO - Penghitungan nilai atau appraisal untuk lahan yang akan digunakan sebagai SMPN 2 Prambon sudah selesai. Kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo tengah melakukan negosiasi harga dengan para pemilik.

Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirto Adi menyatakan, appraisal oleh lembaga independen menjadi dasar negosiasi

dengan pemilik. "Hasil appraisal-nya sudah disampaikan ke pemilik lahan. Sekarang masih negosiasi," jelasnya kemarin.

Tirto menyebutkan, jika nilai lahan yang ditawarkan sesuai dengan hasil appraisal itu disepakati, prosesnya berlanjut ke pembayaran. Namun, jika tidak sepakat, negosiasi akan berlanjut. Anggaran Rp 7,6 miliar sudah disiapkan untuk pembebasan lahan yang saat ini masih berupa lahan tebu tersebut.

Tirto menyebut tidak bisa memberikan harga di atas nilai appraisal. Sebab,

menurut dia, harga hasil appraisal sudah sesuai dengan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP). "Harganya sesuai dengan penghitungan. Karena kalau terlalu murah, kasihan warga. Tapi kalau terlalu mahal juga tidak bisa karena sudah ada landasannya," jelasnya.

Tirto optimistis tahun ini pembebasan lahan tuntas dan selesai sesuai dengan jadwal. Sebab, sebelumnya komunikasi dengan para pemilik juga dilakukan. Selain itu, tidak ada permasalahan tumpang-tindih kepemilikan. "Klir semuanya, ada sertifikatnya," jelasnya.

Setelah pembebasan tuntas, tahun depan SMPN 2 Prambon mulai dibangun. "Sudah disiapkan anggaran pembangunan untuk tahun depan Rp 9 miliar," ujarnya.

Rencananya, dibangun lima kelas dulu. Selain itu, dibangun ruangan pendamping seperti ruang guru, perpustakaan, dan ruang kepala sekolah. Pada 2024 pembangunan bakal dilanjutkan. "Rencana pembangunannya selama dua tahun. Tahun depan dan 2024 untuk pembangunan lanjutan," katanya. (uzi/c19/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home > Uncategorized

Bupati Muhdlor Bangga Jalan Beton Mulai Tuntas

by [cakrajatim](#) — 22 November 2022



Sidoarjo, 22 November: Sejumlah proyek betonisasi jalan tahun 2022 sebagian sudah selesai dan sebagian lagi sedang dalam proses pengerjaan. Betonisasi yang sudah rampung diantaranya; jalan Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono dan Desa Pagernumbuk serta Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu sudah selesai.

Selesainya proyek betonisasi jalan yang dilakukan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP tersebut disambut riang gembira warga Sidoarjo. Hal tersebut tampak dari spanduk yang dibentangkan warga Desa Masangan Kulon dipintu masuk gapura desa. Spanduk yang diperkirakan berukuran 1,5 x 2,5 meter tersebut tertulis ucapan terima kasih kepada bupati Sidoarjo atas bantuan pengecoran jalan Masangan Kulon.

 **CakraJatim.com**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ucapan terima kasih warga Masangan Kulon tidak berlebihan. Peralnya jalan desa tersebut acap kali rusak. Jalan berlobang dengan genangan air disepanjang jalan Masangan Kulon menjadi hal biasa sebelum jalan itu di beton.

Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Muhdlor sendiri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sidoarjo atas dukungan proyek betonisasi jalan yang dilakukannya. Ia sadari, saat proyek betonisasi dilakukan, aktivitas warga akan terganggu. Namun pahit itu hanya sementara. Manisnya bisa dirasakan seluruh masyarakat Sidoarjo berpuluh tahun lamanya.

"Seperti minum jamu, pahitnya hanya sesaat namun kita dapat kembali bugar setelah meminumnya,"ucapnya.

Oleh karenanya ia meminta masyarakat bersabar jika proyek betonisasi sedang dikerjakan. Kesabaran itu salah satu bentuk dukungan terhadap program pembangunan. Gus Muhdlor juga mengajak masyarakat untuk optimis terhadap pembangunan yang sedang dilakukan Kabupaten Sidoarjo. Sikap seperti ini akan meningkatkan semangatnya untuk membawa perubahan di Kabupaten Sidoarjo.

"Saya mohon maaf bila proyek ini mengganggu aktivitas masyarakat, namun saya yakinkan proyek ini pada akhirnya akan membuat kita semua bahagia, 10 sampai 20 tahun nanti kita tidak akan jumpai jalan rusak di Kabupaten Sidoarjo,"ucapnya.

Gus Muhdlor mengatakan proyek betonisasi akan terus digenjot. Tahun depan akan diteruskannya. Oleh karenanya sebageian besar anggaran APBD Sidoarjo dialokasikannya untuk infrastruktur jalan beton.

"Tahun 2023 nanti, proyek betonisasi akan kita lakukan kembali, targetnya seluruh jalan di wilayah Kabupaten Sidoarjo terbeton,"ucapnya.hms



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PEMERINTAHAN

Soal Permintaan Data Komisi A, BKD Sebut Masih Fokus Seleksi Pegawai P3K

Admin — 22/11/2022

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-

Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo menyatakan kecewa dibuat berang (emosi) dengan Badan Kepegawalan Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo, menyusul, permintaan para politisi soal data kekosongan ratusan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo itu tidak kunjung dipenuhi oleh BKD Pemkab Sidoarjo.

Sebenarnya apa yang menjadi kendala dari permintaan itu ?, Imam Mukri Plt BKD melalui Sekretaris BKD Pemkab Sidoarjo, Zainul Arifin Umar, mengaku permintaan data dari DPRD Sidoarjo itu pihaknya hanya bisa mengupayakan sesuai kemampuan.

Alasannya, pihaknya tidak berani menyampaikan dalam forum hearing itu.

"Kami belum bisa menjawab tegas dalam forum ini. Untuk pengisian kekosongan jabatan sendiri juga butuh banyak pertimbangan, Termasuk penyesuaian dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) terbaru," kilah Zainul.

Selain itu, Zainul menambahkan saat ini Pemkab Sidoarjo juga tengah fokus untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Total ada alokasi 2.856 formasi pegawai yang dibutuhkan. Dengan rincian 1.251 tenaga guru, 1.398 tenaga kesehatan dan 207 tenaga teknis.

"Berdasarkan pendataan yang dilakukan BKD, ada sekitar 8.000 pegawai non ASN dan P3K di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Padahal, ketentuan baru dari Badan Kepegawalan Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bakal menghapus tenaga honorer pada November 2023 mendatang," tandasnya. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Berulang Kali Minta Data Kekosongan Ratusan Jabatan Tak Kunjung Diberi BKD, Dewan Sidoarjo Berang

REDAKSI 21 NOVEMBER 2022 20:48:00



HEARING - Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo menggelar hearing bersama para pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo soal kekosongan ratusan jabatan di DPRD Sidoarjo, Senin (21/11/2022).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo dibuat berang (emosi) saat hearing (rapat dengar pendapat) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo, Senin (21/11/2022). Ini menyusul, permintaan para politisi soal data kekosongan ratusan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo itu tidak kunjung dipenuhi oleh BKD Pemkab Sidoarjo.

"Setidaknya, sudah tiga kali pertemuan (Komisi A) dan BKD. Tapi permintaan ke BKD untuk menginformasikan data kekosongan jabatan mulai dari tingkat kelurahan hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo tak kunjung diberikan. Padahal, tujuan kami untuk kajian dan pengawasan. Pengisian jabatan kosong itu demi optimalisasi pelayanan publik untuk masyarakat," ujar anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto yang juga politisi PDI Perjuangan ini kepada republikjatim.com, Senin (21/12/2022).





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Haris. Menurut politisi PAN ini kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo sudah terlalu lama. Karena itu pihaknya khawatir akan berdampak pada layanan yang diberikan ke masyarakat Sidoarjo.

"Kalau hanya diisi Plt (pelaksana tugas) nanti alasannya selalu ragu-ragu dalam mengambil kebijakan. Itu karena alasannya masih status Plt," ungkapnya.

Selain itu, anggota Fraksi PAN DPRD Sidoarjo ini penentuan posisi pegawai khususnya di tingkat kepala OPD memang wewenang Bupati Sidoarjo. Apalagi, Pemkab Sidoarjo juga telah menggelar seleksi terbuka dan mencapai tahap akhir.

"Kalau tidak suka (hasilnya) kan masih bisa diganti. Yang penting jangan terlalu lama pengisian kekosongan jabatan itu. Terutama kekosongan jabatan kepala OPD," paparnya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori menambahkan data internal yang dimilikinya setidaknya ada sekitar 201 kekosongan jabatan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Baginya, hal itu bisa menimbulkan masalah besar jika tidak segera dicarikan solusinya. Karena itu, Komisi A DPRD Sidoarjo terus mendorong untuk segera ada pengisian kekosongan jabatan itu.

"Kami minta data yang lebih rinci juga diperlukan untuk mengawal efektifitas penempatan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Tapi, kalau tidak kunjung dipenuhi, kami ada hak interpelasi yang bisa kami gunakan setiap saat dan setiap waktu. Kalau permintaan kami tidak dihiraukan," kata polisi yang juga anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo ini.

Sementara Sekretaris BKD Pemkab Sidoarjo, Zainul Arifin Umar mengaku permintaan data dari DPRD Sidoarjo itu pihaknya hanya bisa mengupayakan sesuai kemampuan. Alasannya, pihaknya tidak berani menyampaikan dalam forum hearing itu.

"Kami belum bisa menjawab tegas dalam forum ini. Untuk pengisian kekosongan jabatan sendiri juga butuh banyak pertimbangan. Termasuk penyesuaian dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) terbaru," kilah Zainul.

Selain itu, Zainul menambahkan saat ini Pemkab Sidoarjo juga tengah fokus untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Total ada alokasi 2.856 formasi pegawai yang dibutuhkan. Dengan rincian 1.251 tenaga guru, 1.398 tenaga kesehatan dan 207 tenaga teknis.

"Berdasarkan pendataan yang dilakukan BKD, ada sekitar 8.000 pegawai non ASN dan P3K di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Padahal, ketentuan baru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bakal menghapus tenaga honorer pada November 2023 mendatang," tandasnya. Hel/Waw



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Beranda · SIDOARJO - PASURUAN

SIDOARJO - PASURUAN

Sidak Jembatan Rusak di Desa Prasung, Wabup Subandi Instruksikan Dinas PUBMSDA Segera Perbaiki

Penulis Admin · 22 November 2022

2 0



Sidoarjo, Sinar Pos – Jembatan di Desa Prasung Kecamatan Buduran yang kondisinya sudah rusak akan segera dilakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran pemeliharaan dari Dinas PUBMSDA Sidoarjo. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi saat Sidak langsung kondisi jembatan dengan Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono dan Kades Prasung, Selasa (22/11).

Jembatan sepanjang 10 meter yang menghubungkan antar dusun di Desa Prasung tersebut sementara waktu oleh warga ditutupi sebageian ruasnya dengan kayu balok dan bambu agar bisa dilewati kendaraan roda dua dan roda empat secara bergantian.

Wabup Sidoarjo H. Subandi mengatakan untuk sementara ini perbaikan jembatan tersebut dilakukan melalui anggaran pemeliharaan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Apabila nantinya perbaikan dirasa kurang maksimal, maka akan dilakukan pembangunan jembatan yang lebih baik. Seperti pelebaran jembatan. Namun hal itu dapat dilakukan ditahun 2023 mendatang.

“Sementara kita lakukan perawatan dulu dalam waktu Minggu ini dikerjakan, kalau nanti perawatan masih tidak efektif, insha Allah tahun anggaran 2023 kita bangun jembatan yang bagus,” ucapnya.

H. Subandi mengakui akses jalan melalui jembatan tersebut memang padat. “Jembatan ini menjadi akses kendaraan dari arah Desa Banjarsari maupun menuju dari Desa Dukuh Tengah, menjadi hilir mudik masyarakat setiap harinya,” ucapnya.

Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan perbaikan jembatan akan segera ditindaklanjutinya. Dalam dua hari ini, perbaikan jembatan itu akan mulai dilakukan. Sehingga Akhir Desember sudah bisa selesai.

“Dua hari kedepan jembatan ini sudah ada pelaksanaan perbaikan, minimal Minggu ini sudah ada mulai dilakukan perbaikan,” ucap Dwi. (Awi).

